

**PENGARUH PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
BERBASIS AKRUAL SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi pada SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

NURHIKMA
90400114001

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhikma

NIM : 90400114001

Tempat/Tgl. Lahir : Jeneponto, 31 Juli 1996

Jur/Prodi/Konsentrasi : Akuntansi

Fakultas/Program : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Samata-Gowa, Agustus 2021

Penyusun,

NURHIKMA
90400114001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus 1 : Jl. Sili Alauddin No. 67 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus 2 : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata-Sungguminara - Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada SKPD Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa)"** yang disusun oleh **Nurhikma, NIM 90400114001**, Mahasiswa Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munasasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Akuntansi.

Samata-Gowa, September 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak	(.....)
Pembimbing I	: Dr. Saiful Muchlis, SE., M.S.A., Akt., CA	(.....)
Pembimbing II	: Suhartono, SE., M.Si., Ak	(.....)
Penguji I	: Memen Suwandi, SE., M.Si.	(.....)
Penguji II	: Hj. Wahidah Abdullah S.Ag., M.Ag	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP: 19661130 199303 1 003

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hiidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Nabi yang memberi citra kepada manusia tentang bagaimana dan cara beretika sesuai tuntunan wahyu. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa)”**.

Ucapan terimakasih kepada seluruh keluarga besar terkhusus untuk kedua orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda tercinta yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh cinta. Semoga jasanya dibalas oleh Allah swt. Aamiin.

Skripsi ini dapat tersusun atas bantuan dan perhatian berbagai pihak, yang dengan baik hati bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu dan informasi serta senantiasa memberikan semangat sehingga konsistensi selalu terjaga selama pengerjaan skripsi ini. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Hamdan Juhannis, M.Ag., Phd, selaku Rektor beserta Wakil Rektor I, II, III dan IV UIN Alauddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag selaku Dekan beserta Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
3. Bapak Memen Suwandi, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan Ibu Dr. Lince Bulutoding, S.E., M.Si., Ak.CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi UIN Alauddin Makassar.
4. Bapak Dr. Saiful Muchlis, S.E., M.SA., Ak selaku Dosen Pembimbing I, yang telah memberikan waktu luangnya, saran, bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Suhartono, S.E., M.Si., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Staf Jurusan dan Pegawai Akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik selama penulis melakukan studi dan penyelesaian skripsi.
7. Teman-teman Akuntansi angkatan 2014 (CONTABILITA) terkhusus kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas

motivasi, keakraban dan persaudaraannya selama penulis menempuh pendidikan di UIN Alauddin Makassar.

8. Seluruh mahasiswa jurusan akuntansi UIN Alauddin Makassar, terkhusus untuk Muh. Reza Eka Saputra, S.Ak yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan kepada penulis.
9. Untuk teman seperjuangan penulis Ummu Kalsum, Erwini Puspita dan Yuliana, Nuraeni Husain, Asrianti, Nur Rahma Arumanti, Miftahul Izza, Wahyuni Arifin, Andriani dan Musdalifa selaku teman-teman dekat penulis yang telah banyak membantu, memotivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan penelitian
10. Semua keluarga, sahabat, teman-teman, dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dengan ikhlas dalam banyak hal yang berhubungan dengan penyelesaian studi penulis.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan rekan-rekan mahasiswa serta pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga ilmu yang telah didapatkan dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamu ‘alaykum Warahmatullahi Wabarakatuh.

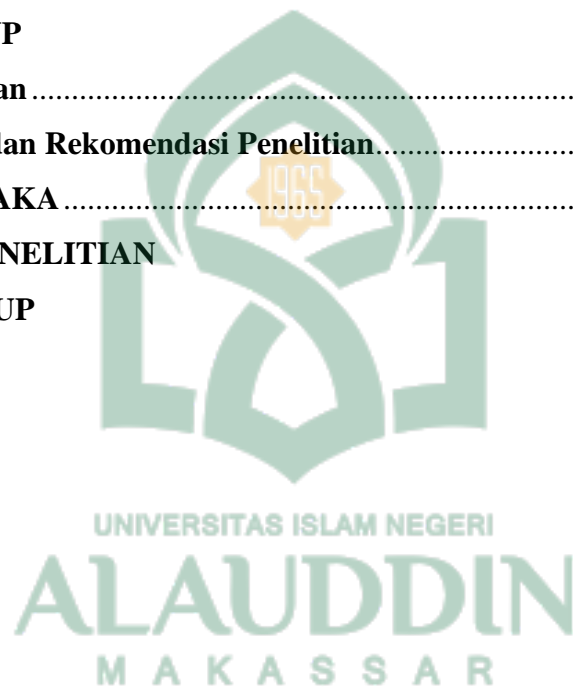
Samata-Gowa, Agustus 2021
Penyusun,

NURHIKMA
90400114001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengembangan Hipotesis.....	6
D. Penelitian Terdahulu	12
E. Tujuan Penelitian.....	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
A. Teori <i>Technology Acceptance Model</i>	15
B. Teori <i>Stewardship</i>	17
C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	18
D. Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	21
E. Kompetensi Aparatur	22
F. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual	23
G. Kerangka Pikir	26
H. Defenisi Operasional Variabel	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Populasi dan Sampel.....	29
D. Jenis dan Sumber Data	29

E. Metode Pengumpulan Data	30
F. Instrumen Penelitian	30
G. Metode Analisis Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa	41
B. Hasil Analisa Data	43
C. Pembahasan	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Kendala dan Rekomendasi Penelitian	62
DAFTAR PUSTAKA	64
KUISIONER PENELITIAN	
RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Nama : Nurhikma
NIM/Jurusan : 90400114001
Judul : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Skpd Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi (X1) dan kompetensi aparatur (X2) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (y), dan bagaimana pengaruh kedua variabel independen tersebut terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan adanya standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang digunakan yakni data primer dengan instrumen penelitian berupa kuisioner berskala *likert* yang disusun berdasarkan indikator tiap variabel. Metode analisa data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk hipotesis pertama dan kedua, sedangkan untuk hipotesis ketiga dan keempat menggunakan analisis regresi moderasi.

Temuan penelitian mengungkapkan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kabupaten Gowa. Selain itu, standar akuntansi pemerintah juga mampu memoderasi (menguatkan) pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SKPD Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Standar Akuntansi Pemerintah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reuiu atas laporan kinerja dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi ini bertujuan untuk menilai imlementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja dilingkungan pemerintah dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Tekait dengan organisasi publik, akuntabilitas institusi pemerintah yang selanjutnya disebut akuntabilitas publik merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi, strategi, maupun operasionalisasi/pelaksanaannya dalam institusi yang bersangkutan

(Supriyono, 2002). Berdasarkan definisi tersebut maka melalui akuntabilitas public diharapkan dapat tercipta sebuah mekanisme yang dapat memantau perilaku, tindak tanduk dan kinerja dari pejabat birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewenangannya.

Keterbukaan informasi dan akuntabilitas merupakan dua hal yang menjadi poin penting dalam pemerintahan namun teknologi informasi yang ada tidak atau belum mampu dimanfaatkan secara maksimal, maka implementasi teknologi menjadi sia-sia dan semakin mahal. Kendala penerapan teknologi informasi antara lain berkaitan dengan kondisi perangkat keras, perangkat lunak yang digunakan, pemutakhiran data, kondisi sumber daya manusia yang ada, dan keterbatasan dana. Kendala ini yang mungkin menjadi faktor pemanfaatan teknologi di instansi pemerintah belum optimal. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap keterandalan dan ketepatan waktu laporan keuangan pemerintah (Indriasari dan Naharyanto, 2008).

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap aparatur dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat (Putri, 2015). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut dapat

mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik memegang peranan penting dalam usaha menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan. Akuntansi sektor publik memiliki mempunyai peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2008). Hasil penelitian Riyadi dan Kurnadi (2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Hasil yang sama sebelumnya dikemukakan oleh Karyadi (2019) Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam penelitian Resfiana (2019) mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara signifikan jika dimanfaatkan secara maksimal.

Namun, pemanfaatan teknologi informasi ini juga harus didukung dengan kompetensi aparatur yang mumpuni. Sebagaimana yang diuraikan oleh Riawan (2016) bahwa kompetensi yang dimiliki dan dukungan sistem informasi keuangan daerah yang telah dimanfaatkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau

terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai.

Penelitian Karyadi (2019) mengungkapkan bahwasanya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Hasil penelitian yang kurang lebih sama diungkapkan Raharja dkk. (2020) dalam penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut menjelaskan dan sepakat bahwa semakin kompeten aparatur pemerintah maka pengelolaan atau dalam hal ini akuntabilitas keuangan juga akan semakin baik. Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi dan juga kompetensi yang baik tentunya memerlukan suatu pedoman atau standar yang baku agar tujuan akuntabilitas dapat dicapai secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Lumenta dkk. (2016) yang mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian dengan hasil serupa juga diungkapkan oleh Fitriyani dan Herawati (2019) bahwa Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal tersebut menjadi hal yang wajar mengingat pada dasarnya membuat Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraeni dan Budiantara, 2015).

Merujuk pada apa yang telah diuraikan, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua sebagai Variabel Moderating.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini kemudian disusun sebagai berikut:

1. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
2. Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua?
4. Apakah Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan dimoderasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua?

C. Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemerintah. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teori TAM terkait dengan *intention to use* (kegunaan) yang menjadi sebuah kewajiban dari adanya penggunaan aplikasi. Keharusan ini seakan menjadi hal mutlak mengingat suatu sistem yang dikembangkan atau diterapkan harus memiliki kegunaan yang jelas dan terarah (Putri, 2015). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan.

Laporan keuangan sektor publik memegang peranan penting dalam usaha menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Informasi keuangan ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntansi sector publik memiliki mempunyai peranan penting dalam menyiapkan laporan keuangan sebagai perwujudan akuntabilitas publik (Mahmudi, 2008). Hasil penelitian Riyadi dan Kurnadi (2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Hasil yang sama sebelumnya dikemukakan oleh Karyadi (2019) Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam penelitian Resfiana (2019) mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara signifikan jika dimanfaatkan secara maksimal. Merujuk kepada uraian tersebut, peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Resfiana (2019) mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara signifikan jika dimanfaatkan secara maksimal. Namun, pemanfaatan teknologi informasi ini juga harus didukung dengan kompetensi aparatur yang mumpuni. Sebagaimana yang diuraikan oleh Riawan (2016) bahwa kompetensi yang dimiliki dan dukungan sistem informasi keuangan daerah yang telah dimanfaatkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah

daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi SDM ini menjadi suatu keharusan, terlebih lagi SDM yang dalam hal ini adalah aparatur harus bisa benar-benar mengayomi dan melayani masyarakat selaku *steward* (pelayan) dalam masyarakat sebagai mana yang telah dipaparkan dalam *stewardship theory* terkait dengan peranan melayani masyarakat.

Penelitian Karyadi (2019) mengungkapkan bahwasanya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Hasil penelitian yang kurang lebih sama diungkapkan Raharja dkk. (2020) dalam penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut menjelaskan dan sepakat bahwa semakin kompeten aparatur pemerintah maka pengelolaan

atau dalam hal ini akuntabilitas keuangan juga akan semakin baik. Merujuk pada uraian tersebut, peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Dimoderasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat (Putri, 2015). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan. Hal ini kemudian harus didukung dengan kehadiran standar yang menjadi acuan prosedur kinerja yang kita kenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Penerapan standar ini tidak lain digunakan untuk menjaga prinsip *intention to use* (menjaga relevansi fungsinya) dan

menghindarkan dari *behavioral intention* atau yang biasa kita istilahkan sebagai potensi penyelewengan dalam suatu pengelolaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lumenta dkk. (2016) yang mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian dengan hasil serupa juga diungkapkan oleh Fitriyani dan Herawati (2019) bahwa Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal tersebut menjadi hal yang wajar mengingat pada dasarnya membuat Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraeni dan Budiantara, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual memoderasi pengaruh Positif dan Signifikan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

4. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang Dimoderasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Hal ini menjadi keharusan tersendiri mengingat peran aparatur sebagai *steward* (pelayan) dalam masyarakat dan dalam pengelolaan dilingkup pemerintahan.

Penelitian Karyadi (2019) mengungkapkan bahwasanya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Hasil penelitian yang kurang lebih sama diungkapkan Raharja dkk. (2020) dalam penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut menjelaskan dan sepakat bahwa semakin kompeten aparatur pemerintah maka pengelolaan atau dalam hal ini akuntabilitas keuangan juga akan semakin baik. Lebih lanjut, kompetensi yang baik tentunya memerlukan suatu pedoman atau standar yang

baku agar tujuan akuntabilitas dapat dicapai secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Lumenta dkk. (2016) yang mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian dengan hasil serupa juga diungkapkan oleh Fitriyani dan Herawati (2019) bahwa Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal tersebut menjadi hal yang wajar mengingat pada dasarnya membuat Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraeni dan Budiantara, 2015). Berdasarkan uraian tersebut, peneliti kemudian merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H4: Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual memoderasi pengaruh Positif dan Signifikan Kompetensi Aparatur Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

D. Penelitian Terdahulu

Berikut peneliti sajikan beberapa referensi utama yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun dan melakukan penelitian ini.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1	Nugraeni dan Budiantara (2015)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja	Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi tidak berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas kinerja. Sedang kualitas laporan keuangan secara langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.
2	Lumenta dkk. (2016)	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan)	Hasil Penelitian ini: Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sedangkan Ketaatan Peraturan Perundangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara simultan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3	Zulfiandri (2017)	Faktor-Faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada OPD di Pemerintah Provinsi Banten)	Hasil peneltian menunjukkan bahwa Kejelasan sasaran anggaran, Kompetensi aparatur, Penerapan akuntansi keuangan, Pengawasan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4	Fitriyani dan Herawati (2019)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat	Berdasarkan hasil pembahasan dan uji hipotesis yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya maka, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Akuntansi berbasis akrua, sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Inspektorat Bengkulu Tengah,

		Kabupaten Bengkulu Tengah)	dengan nilai pengaruh besaran 82% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel X dalam penelitian ini.
5	Atiningsih dan Ningtyas (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)	Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

E. Tujuan Penelitian

Merujuk pada apa yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimoderasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akual.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimoderasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akual.

F. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan ilmu tentang akuntansi keuangan daerah dan akuntansi keprilakuan yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur pemerintah daerah dalam kaitannya dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan menjadi pelecut terselenggaranya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui berbagai faktor yang telah dijelaskan dalam penelitian ini yakni pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur, dan juga penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

BAB II

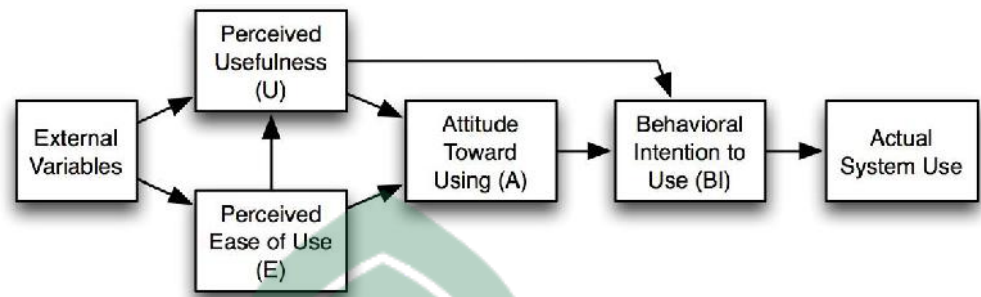
TINJAUAN TEORETIS

A. *Teori Technology Acceptance Model (TAM)*

Technology Acceptance Model (TAM) atau Model penerimaan teknologi adalah salah satu model yang dibangun untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. Teori ini pertama kali dicetuskan oleh Davis tahun 1989. Model Penerimaan Teknologi (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) adalah model yang berhasil dan sangat dapat diterima untuk memprediksi penerimaan terhadap suatu teknologi yang baru diterapkan. TAM adalah pengembangan TRA (*Theory of Reasoned Action*) dan diyakini mampu meramalkan penerimaan pemakai terhadap teknologi berdasarkan dampak dari dua faktor, yaitu perspektif kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan perspektif kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*) (Davis, 1989).

Menurut Davis (1989) TAM adalah sebuah teori sistem informasi yang didesign guna menerangkan bagaimana pengguna mengerti dan mengaplikasikan sebuah teknologi informasi. TAM mengadopsi TRA dari Fishbein (Fishbein, 1967) yang digunakan untuk melihat tingkat penggunaan responden dalam menerima teknologi informasi. Konstruksi asli TAM sendiri yang dirumuskan oleh Davis (1989), adalah persepsi kegunaan (*perceived usefulness*), persepsi kemudahan pemakaian (*perceived ease of use*), sikap (*attitude*), niat perilaku (*behavioral intention*),

penggunaan sebenarnya (*actual use*) dan ditambahkan beberapa perspektif eksternal yaitu, pengalaman (*experience*) serta kerumitan (*complexity*).



Gambar 2.1. Diagram Konsep *Technology Acceptence Model* (TAM)

Wijaya (2006:39) menyatakan bahwa TAM mendeskripsikan terdapat dua faktor yang secara dominan mempengaruhi integritas teknologi. Faktor pertama adalah persepsi pengguna terhadap manfaat teknologi. Sedangkan faktor kedua adalah persepsi pengguna terhadap kemudahan penggunaan teknologi. Kedua factor tersebut mempengaruhi kemauan untuk memanfaatkan teknologi. Selanjutnya kemauan untuk memanfaatkan teknologi akan mempengaruhi penggunaan teknologi yang sesungguhnya. Pada umumnya pengguna teknologi akan memiliki persepsi positif terhadap teknologi yang disediakan. Persepsi negatif akan muncul sebagai dampak dari penggunaan teknologi tersebut. Artinya persepsi negatif berkembang setelah pengguna pernah mencoba teknologi tersebut atau pengguna berpengalaman buruk terhadap penggunaan teknologi tersebut. Sehingga model TAM dapat digunakan sebagai dasar

untuk menentukan upaya-upaya yang diperlukan untuk mendorong kemauan menggunakan teknologi.

B. Teori Stewardship

Pada masa perkembangan akuntansi, pendekatan *stewardship* telah dipakai sebagai suatu pendekatan untuk menentukan titik berat utama dari suatu laporan keuangan, yang didasarkan kepada suatu konsep bahwa manajemen pada suatu perusahaan dianggap bertanggungjawab kepada pemilik untuk mengamankan kekayaan yang telah dipercayakan kepadanya. Pemilik bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai steward. Pendekatan ini berasal dari ilmu psikologi dan sosiologi yang didisain oleh para peneliti untuk membentuk suatu perilaku yang mengarah pada sikap melayani (*stewardship*).

Teori *stewardship* sangat berhubungan dengan konsep-konsep yang mencakup tentang model of man, behavioral, mekanisme psikologis (motivasi, identifikasi dan kekuasaan), dan mekanisme situasional yang mencakup manajemen dan perbedaan kultur (Pasoloran, 2001). Teori *stewardship* dibangun berdasarkan asumsi filosofi mengenai hakekat sifatsifat manusia yang dapat dipercaya, mampu bertindak dan bertanggungjawab, memiliki integritas dan kejujuran untuk kepentingan publik dan stakeholder. Selanjutnya teori *stewardship* juga mengasumsikann bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik, steward akan melindungi dan memaksimalkan kinerja orgnisasi, kepentingan pemilik.

C. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Yuniarti (2017) akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ini erat kaitannya dengan tanggung jawab yang menjadi suatu keharusan didalam Islam. Dalam Islam, menjaga tanggung jawab ini sama halnya dengan menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Tahrim/66:6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Terjemahan Kementerian Agama RI, 2019)

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dikutip dari tafsirq.com (2021), ayat tersebut ditafsirkan “Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri

dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri atas manusia dan bebatuan. Yang menangani neraka itu dan yang menyiksa penghuninya adalah para malaikat yang kuat dan keras dalam menghadapi mereka. Para malaikat itu selalu menerima perintah Allah dan melaksanakannya tanpa lalai sedikit pun.” Dengan demikian, jika dikorelasikan dengan akuntabilitas, maka dengan jelas dapat diketahui bahwasanya menjadi suatu kewajiban untuk menjaga tanggung jawab entah itu untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat seperti halnya dengan akuntabilitas dalam instansi pemerintahan yang erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran. Dalam rangka pertanggungjawaban tersebut diperlukan penerapan pelaporan keuangan yang tepat, jelas dan terukur sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas (Nugraeni dan Budiantara, 2015).

Perlu diketahui bahwasanya akuntabilitas bukan hanya sebatas pada penyusunan laporan keuangan saja, tetapi sebagai upaya menguatkan akuntabilitas yang merupakan salah satu langkah penting dilakukan demi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Afriyanti dan Sabanu, 2015). Akuntabilitas pemerintah dapat dilihat dari dua bagian yakni akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja (Sardi dkk., 2016). Akuntabilitas segi keuangan dan akuntabilitas segi kinerja mempunyai hubungan yang kuat dengan pengelolaan keuangan dan anggaran negara karena laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dibuat berdasarkan laporan keuangan sesuai yang diamatkan dalam PP Nomor 8 tahun 2006. Adapun sasaran dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah;

1. Menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
2. Terwujudnya transparansi instansi pemerintah.
3. Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
4. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Pratiwi dan Setyowati (2017) mengungkapkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas dalam rana instansi pemerintah, sebaiknya memahami beberapa prinsip-prinsip penting yakni sebagai berikut ini:

1. Harus ada komitmen dan pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintahan peril melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu system yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan aktif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan tekoni pengukur kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, untuk menyelenggarakan pemerintahan, Gubernur selaku penyelenggara eksekutif daerah di bidang otonomi daerah bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam

kedudukannya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah bertanggungjawab kepada Presiden. Sedangkan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten/Kota, Bupati atau Walikota bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

Dikaitkan dengan masalah akuntabilitas dalam artian pertanggungjawaban, maka di dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas dikemukakan dalam beberapa pasal berikut: Pasal 27 ayat (2) *Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPR, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat; ayat (3) Laporan penyelenggaraan pemerintah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; ayat (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) digunakan pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

D. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintah No 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No 11 tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Reformasi birokrasi yang dilatarbelakangi tuntutan terhadap terbentuknya sistem pemerintahan yang bersih, transparan dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara lebih efektif melahirkan dua hal utama dalam pengertian *e-government* yang pertama adalah penggunaan teknologi informasi dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya. Teknologi informasi merupakan kombinasi teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) untuk mengolah dan menyimpan informasi dengan teknologi komunikasi untuk melakukan transmisi informasi. Teknologi informasi memanfaatkan komputer elektronik dan perangkat lunak komputer untuk mengubah, menyimpan, memproses, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara aman.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi sangat penting guna memberikan kebermanfaatan bagi seluruh pengguna informasi termasuk

masyarakat. Terkait kebermanfaatan ini sendiri, Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Isra/17:7 sebagai berikut:

نُحَسِّنُكُمْ لَأَنفُسِكُمْ

Terjemahan:

Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. (Terjemahan Kementerian Agama RI, 2021)

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dikutip dari tafsirq.com (2021), ayat tersebut ditafsirkan “Kami katakan kepada mereka, "Bila kalian berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. Ketika datang waktu pembalasan dari perbuatan jahat kalian yang terakhir--dari dua kali kejahatan yang telah kalian lakukan dalam membuat kerusakan di muka bumi--maka Kami datangkan musuh-musuh kalian untuk menorehkan bekas kejahatan, kehinaan dan kepedihan yang menyuramkan wajah-wajah kalian. Dan pada akhirnya mereka masuk Masjid Bayt al-Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama. Mereka juga akan memusnahkan apa yang mereka kuasai dengan sehabis-habisnya.”

Jika dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, ayat ini secara implisit memerintahkan kepada seluruh pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan informasi keuangan harus bisa memaksimalkan kehadiran teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangannya secara maksimal demi menghindari adanya penyimpangan

yang dapat merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

E. *Kompetensi Aparatur*

Salah satu faktor penting untuk menyusun pelaksanaan otonomi daerah adalah ketersediaan SDM aparatur pemerintah yang berkemampuan dan professional termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Istilah aparatur berasal dari kata aparat yang berarti petugas pemerintah. Oleh karena itu aparatur berarti para aparatur sipil negara yang bekerja pada instansi-instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sumber daya aparatur adalah merupakan faktor penting dalam rangka menerapkan suatu mekanisme kerja yang efisien dan efektif, sebab aparatur atau kepegawaian merupakan subjek dalam setiap aktifitas pemerintahan. Aparaturlah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan, oleh sebab itu agar mekanisme pemerintahan tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subjek atau pelakunya harus memiliki kemampuan yang baik pula. Tanpa manusia pelaksana yang berkinerja baik, maka mekanisme dalam pemerintahanpun tidak dapat berjalan dengan baik (Faturahman, 2020).

Kompetensi aparatur erat kaitannya dengan bagaimana aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelimuannya terhadap bidang yang digeluti. Pada dasarnya, menuntut ilmu akan meningkatkan kompetensi seseorang secara linear, di mana hal ini juga telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam haditsnya sebagai berikut:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim, no. 2699)

Allah SWT juga telah menegaskan dalam Q.S Al-Mujadalah/58:11 tentang pentingnya menuntut ilmu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Terjemahan Kementerian Agama RI, 2021)

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dikutip dari tafsirq.com (2021), ayat tersebut ditafsirkan “Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian maka lakukanlah, Allah pasti akan melapangkan segala sesuatu untuk kalian! Juga apabila kalian diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah! Allah akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang ikhlas dan orang-orang yang berilmu menjadi beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat.” Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa

kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Jika dikorelasikan dengan kompetensi yang dibahas pada bagian ini, maka sangat jelas perintah bagi aparatur untuk terus meningkatkan kompetensinya guna menghadirkan akuntabilitas yang jauh lebih baik kedepannya.

F. *Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua*

Sebelum adanya peraturan pemerintah mengenai sistem akuntansi keuangan pemerintah berbasis akrual, sistem yang digunakan ialah sistem akuntansi berbasis kas atau *single entry*. Dalam sistem *single entry* pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali, dimana transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat di sisi penerimaan di dalam buku kas umum (BKU) sedangkan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat disisi pengeluaran di dalam buku kas umum. (Erlina, 2018). Sistem pencatatan *single entry* ini memiliki beberapa kelebihan yaitu kesederhanaanya dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki banyak kelemahan diantaranya sulit membuat penyusunan laporan keuangan dan sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. Disamping itu, sistem ini memiliki kelemahan karena tidak dapat menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah. Oleh karena itu dibutuhkan sistem pencatat lain yang dapat menyajikan laporan keuangan pemerintah secara akuntabel, transparan dan lengkap.

Sistem akuntansi berbasis kas ini dianggap tidak menyediakan informasi yang kompleks dan sebenarnya dibutuhkan oleh pemakai laporan keuangan karena hanya mengakui arus kas masuk maupun arus kas keluar. Riyani *et. al.* (2017) menyatakan bahwa kelemahan akuntansi berbasis kas adalah tidak mampu menyajikan jumlah

sumber daya yang digunakan serta tidak mampu memperhitungkan atau mempertimbangkan kewajiban keuangan, hutang, komitmen masa depan, penjaminan oleh pemerintah, atau kewajiban kontingen, terfokus secara sempit pada pembayaran kas, tidak peduli akan kondisi dan daya layan aset tetap, terfokus pada pengendalian input, pembelian, perolehan dan mengabaikan produksi sendiri. Banyaknya kekurangan yang ada pada sistem akuntansi berbasis kas tersebut sehingga pemerintah diuntut untuk memperbaiki sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah dari basis kas menjadi basis akrual.

Accrual basis merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas dan setara kas diterima atau dibayarkan (Satrio *et al.*, 2016). Pelaporan akrual membuat pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya (Asfiansyah, 2015). *accrual basis* ini juga dapat membantu pengguna laporan keuangan untuk melakukan evaluasi kemampuan entitas untuk memenuhi kewajiban dan komitmen-komitmennya (Novianti *et al.*, 2018). Standar akuntansi berbasis akrual memang dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, keberadaan akrual basis sangat penting untuk diterapkan (Nadir dan Hasyim, 2017). tetapi perlu diperhatikan bahwa ada beberapa item dalam akun transaksi *accrual basis* yang mengandung unsur ketidakpastian

seperti pengakuan pendapatan sebelum kas diterima berpotensi tidak tertagih. dalam hal ini merupakan praktik dari unsur *taghrir*. sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait *accrual basis* dalam pandangan islam sehingga konsep ini dapat diterima dengan baik.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pada tahun 2010 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, sehingga sejak saat itu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar akuntansi pemerintahan tercantum dalam dua lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, yaitu: standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan menuju berbasis akrual. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, yaitu standar akuntansi pemerintahan yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran

berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual tersebut dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) dan dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini merupakan suatu bentuk perintah dalam bentuk pedoman dalam rangka menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam bingkai akuntabilitas. Jika dikaji secara spesifik, standar ini merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh aparatur. Keberadaan standar ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan peranan dan fungsinya khususnya dalam hal akuntabilitas. Artinya, jika standar ini dijalankan dengan baik dan benar, maka akan mendatangkan keberkahan, begitupun sebaliknya bila disalahgunakan akan mendatangkan mudharat. Allah SWT berfirman dalam Q.S Hud/11:117-119 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْفَرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ۚ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ۚ إِلَّا مَنْ رَجِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Terjemahan:

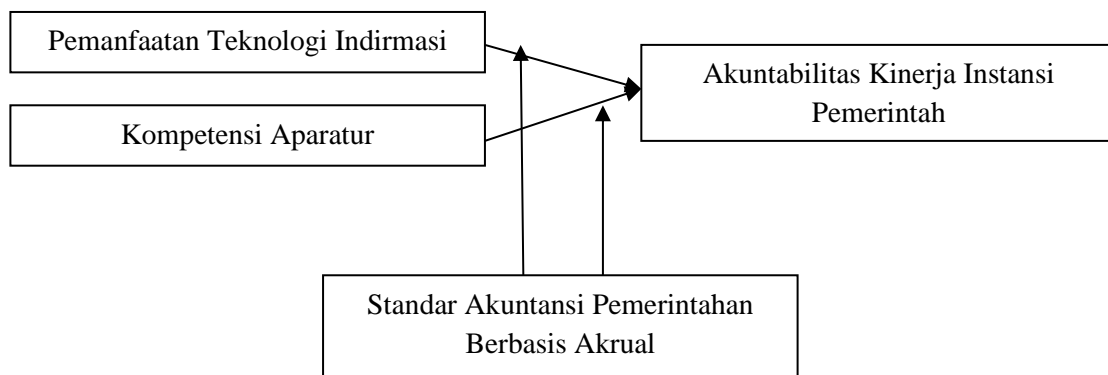
Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusanNya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. (Terjemahan Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dikutip dari tafsirq.com (2021), ayat tersebut ditafsirkan Akan tetapi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah karena fitrah mereka yang suci, sepakat tentang ketentuan Allah untuk mereka, sehingga mereka percaya kepada para rasul, kitab-kitab suci dan hari kiamat. Atas dasar kehendak-Nya yang telah ditetapkan dalam sistem alam raya ini, Allah menciptakan manusia siap untuk menerima pahala dan siksa. Dengan begitu, janji Allah pun terlaksana, yaitu neraka jahanam akan diisi dengan pengikut-pengikut iblis yang terdiri atas manusia dan jin. Ayat ini mengatur pentingnya menaati ketentuan Allah, pun demikian standar yang dibuat manusia sebagai wakil-wakil Allah dimuka bumi ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua ini harus dipatuhi karena pada dasarnya dibuat untuk menghadirkan kebaikan yakni akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini disajikan pada gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2 Kerangka Pikir



H. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi dan operasional variabel dalam penelitian ini akan peneliti sajikan dalam tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1 Defenisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Cara Ukur
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Menurut Yuniarti (2017) akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Instansi pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Input</i> 2. <i>Output</i> 3. <i>Outcome</i> 4. <i>Benefit</i> 5. <i>Impact</i> <p>Sumber: Jamaluddin (2017)</p>	Kusioner dengan skala likert.
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Pemanfaatan teknologi informasi merupakan manfaat yang diharapkan oleh pengguna sistem informasi dalam melaksanakan tugasnya atau perilaku dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Komputer 2. Jaringan Internet 3. Penggunaan Sistem <p>Sumber: Sari dkk. (2017)</p>	Kusioner dengan skala likert.

Kompetensi Aparatur (X2)	Sumber daya aparatur adalah merupakan faktor penting dalam rangka menerapkan suatu mekanisme kerja yang efisien dan efektif, sebab aparatur atau kepegawaian merupakan subjek dalam setiap aktifitas pemerintahan. Aparaturlah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterampilan 2. Pengetahuan 3. Kemampuan <p>Sumber: Sari dkk. (2017)</p>	Kusioner dengan skala <i>likert</i> .
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua	<i>Accrual basis</i> merupakan suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas dan setara kas diterima atau dibayarkan (Satrio <i>et al.</i> , 2016).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesiapan sumber daya manusia 2. Peran standar akuntansi pemerintah berbasis akrual 3. Faktor pendukung <p>Sumber: Erawati dan Kurniawan (2018)</p>	Kusioner dengan skala <i>likert</i> .

Sumber: Data Olahan Peneliti (2021)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian kuantitatif. Siregar (2013), penelitian merupakan penyaluran rasa ingin tahu seseorang terhadap masalah atau sesuatu dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti mengusut, memeriksa, menelaah, dan menelaah secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga didapatkan suatu jawaban atas masalah, mendapatkan kebenaran, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Metode kuantitatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan cara, menganalisis mengumpulkan, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi instansi pemerintah.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian akan dilakukan di Pemerintah Kabupaten Gowa selama kurun waktu April-Mei 2021.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan didalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang merupakan studi terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dan menguji hipotesis yang diajukan dalam suatu penelitian.

C. *Populasi dan Sampel*

1. Populasi

Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa atau segala sesuatu yang memiliki karekteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari serta ditarik kesimpulan (Indriantoro dan Supomo, 2002). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Gowa yang berjumlah 44 SKPD. Penelitian ini menggunakan seluruh populasi sebagai sampel, sehingga sampel dalam penelitian ini sebanyak 44 SKPD yang ada di Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi dan menjadi wakil dari populasi tersebut. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* adalah teknik dimana sample ditentukan dengan kriteria atau pertimbangan tertentu. Adapun sampel dalam penelitian disengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

D. *Jenis dan Sumber Data*

1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian adalah data kuantitatif berupa nilai atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tercantum dalam kuesioner.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data langsung dari sumber data peneliti yang diperoleh secara langsung dari sumber data aslinya dan tidak melalui media perantara (Indriantono dan Supomo, 2013). Data primer dalam penelitian ini adalah tanggapan yang akan dijawab langsung oleh subjek peneliti melalui kuesioner (Kuncoro, 2013).

E. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang berbentuk daftar pertanyaan tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang kemudian akan responden jawab, dimana sudah disediakan alternatif jawaban dari pertanyaan yang sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih. Kuesioner adalah kumpulan atau daftar pertanyaan yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya dan hal-hal yang mereka ketahui. Prosedur pengumpulan tersebut digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai variabel penelitian yaitu pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Untuk memperoleh data yang sebenarnya, kuesioner dibagikan secara langsung kepada responden yang terkait diseluruh SKPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Gowa.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang merupakan saran yang dapat diwujudkan dalam benda, contohnya angket atau kuesioner (Ridwan, 2013). Dimana

angket atau kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan pada orang lain dengan maksud agar orang yang diberikan angket atau kuesioner tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna (Sugiyono, 2013:134). Adapun Kuesioner digunakan untuk mengukur variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1), Kompetensi Aparatur (X2), Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y), dan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (M). Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala *likert*, dimana nilai yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Likert

Simbol	Jawaban Angket Peneliti	Nilai
SS	Sangat Setuju	5
S	Setuju	4
RR	Ragu-Ragu	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

Ciri dari skala likert ini bahwa semakin tinggi skor yang diperoleh oleh seorang responden adalah indikasi bahwa responden tersebut sikap atau perilakunya semakin positif terhadap objek yang ingin diteliti oleh peneliti tersebut.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk mensesederhanakan data agar lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk memproses dan menganalisis data yang telah dikumpulkan. Adapun tujuan

analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan bantuan komputer melalui program IBM SPSS for windows.

1. Analisis Data Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif merupakan penelitian terhadap masalah-masalah yang berupa fakta saat ini dari suatu populasi. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian. Statistik deskriptif dapat digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian. Data tersebut meliputi umur, jenis kelamin, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja.

2. Uji Kualitas Data

a) Uji validitas

Merupakan ketetapan atau kecermatan suatu instrument dalam pengukuran. Uji validasi dimaksudkan untuk mengukur kualitas kuesioner yang dipergunakan sebagai instrument penelitian sehingga mampu dikatakan instrument tersebut valid. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Kriteria pengujian validasi yaitu, sebagai berikut:

1. Jika r hitung positif dan r hitung $> r$ table maka butir pernyataan tersebut adalah valid.
2. Jika r hitung negative dan r hitung $< r$ table maka butir pernyataan tersebut adalah tidak valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel suatu konstruk. Suatu kuesioner handal (reliable) jika jawaban terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu (Ghozali, 2013). Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pengukuran sekali saja (*one shot*) disini pengukurannya hanya sekali lalu hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antara jawaban pertanyaan. Untuk menguji reabilitas kuesioner digunakan teknik *cronbach alpha*, suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan *cronbach alpha* > 0.60 atau lebih besar daripada 0.60.

3. Uji Asumsi Klasik

Uji ini dilakukan untuk mengetahui bahwa data yang diolah adalah sah serta distribusi normal maka data tersebut akan diuji melalui uji asumsi klasik yaitu:

a) Uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dua model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan dua

cara yaitu: 1) uji *kolmogorov smirnov* dan 2) grafik normal *probability plot*. Pada *kolmogorov smirnov* dapat dilihat: Jika probabilitas $> 0,05$ maka data penelitian memenuhi asumsi normalitas. Dan apabila probabilitas $< 0,05$ maka data penelitian dianggap tidak memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan Pada grafik normal *probability plot* data dalam penelitian ini dapat dikatakan terdistribusi apabila titik-titik pada grafik mendekati garis diagonal.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal. Variabel ortogonal yang merupakan variabel independen yang nilai korelasi antara sesama variabel independen sama dengan nol. Adapun cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai tolerance dan VIF (*Variance Inflation Factor*).

1. Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka dapat diartikan bahwa tidak terdapat multikolonieritas pada penelitian tersebut.
2. Jika nilai tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 , maka terjadi gangguan multikolonieritas pada penelitian tersebut (Ghozali, 2013).

c) Uji Autokorelasi

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi antara variabel bebas (independent variabel). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas, karena jika hal tersebut terjadi maka variabel-variabel tersebut tidak orthogonal atau terjadi kemiripan. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasinya antara sesama variabel bebas lain sama dengan nol.

Dalam penelitian ini untuk mendeteksi ada tidaknya Multikolinieritas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai toleransi dan varian inflasi faktor (VIF), nilai toleransi yang besarnya diatas 0,1 dan nilai VIF dibawah 10 menunjukkan bahwa tidak ada Multikolinieritas diantara variabel bebasnya.

d) Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi, ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Kemudian untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas bisa dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatter Plot*. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang beraturan maka itu menunjukkan bahwa

heteroskedastisitas telah terjadi, dan apabila tidak ditemukan pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka heteroskedastisitas tidak terjadi. Intrepetasi yang digunakan selain melihat grafik Scatter Plot adalah uji Park dimana pada uji ini dilakukan dengan meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Masalah heterokedastisitas tidak akan terjadi apabila nilainya signifikansi antara variabel independen dengan absolut lebih besar dari nilai signifikasi 0,05 pada tingkat kepercayaan 5%.

4. Uji Hipotesis

a) Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis terhadap dampak variabel dependen dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*). Analisis regresi linier berganda (*Multiple Regression*) digunakan untuk menguji variabel satu atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan. Secara sistematis adapun rumus untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y	=	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
α	=	Konstanta
X1	=	Pemanfaatan Teknologi Informasi

X2	=	Kompetensi Aparatur
$\beta_1 - \beta_3$	=	Koefisien regresi berganda
e	=	<i>Error Term</i>

b) Regresi Moderasi dengan Pendekatan Nilai Selisih Mutlak

Ghozali (Frucot dan Shearno, 2013) mengajukan model regresi yang berbeda untuk menguji variabel moderasi yaitu dengan model selisih mutlak dari variabel independen. Interaksi ini lebih disukai oleh karena ekspektasinya sebelumnya berhubungan dengan kombinasi antara X1, dan X2 dan berpengaruh terhadap Y. Misalnya jika skor tinggi untuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur berasosiasi dengan skor rendah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (skor tinggi), maka akan terjadi perbedaan nilai absolut yang besar maupun sebaliknya. Kedua kombinasi tersebut diharapkan akan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Langkah uji selisih nilai mutlak dalam penelitian dapat digambarkan dengan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 ZX1 + \beta_2 ZX2 + \beta_3 |ZX1 - ZM| + \beta_4 |ZX2 - ZM| + e$$

Keterangan:

Y	=	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
ZX1	=	Pemangfaatan Teknologi Informasi
ZX2	=	Kompetensi Aparatur
ZM	=	SAP Berbasis Akrual

$|ZX1-ZM|$ = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX1 dan ZM

$|ZX2-ZM|$ = Merupakan interaksi yang diukur dengan nilai absolut perbedaan antara ZX2 dan ZM

a = Kostanta

β = Koefisien Regresi

e = *Error Term*

Uji hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi dan uji regresi secara parsial (t-test):

1. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 memiliki interval antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika nilai R^2 (*Adjusted r square*) bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk mendeteksi variabel dependen. Sedangkan jika R^2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen masih sangat terbatas. Kriteria untuk analisis koefisien determinasi adalah, sebagai berikut:

- a) Jika R^2 mendekati 0 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak kuat.

- b) Jika k_d mendekati 1 berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

2. Regresi Secara Parsial

Uji t digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial guna menunjukkan pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Penetapan untuk mengetahui hipotesis diterima atau ditolak ada dua cara yang dapat dipilih yaitu:

a) Membandingkan t hitung dengan t tabel

1. Jika t hitung $> t$ tabel maka hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.
2. Jika t hitung $< t$ tabel maka hipotesis ditolak. Artinya tidak ada pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen.

b) Melihat Probabilities Values

Berdasarkan nilai probabilitas dengan $\alpha = 0,05$

1. Jika probabilitas $> 0,05$, maka hipotesis ditolak.
2. Jika probabilitas $< 0,05$, maka hipotesis diterima.
3. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan arah hipotesis (positif atau negatif) walaupun berada dibawah tingkat signifikan, maka hipotesis ditolak.

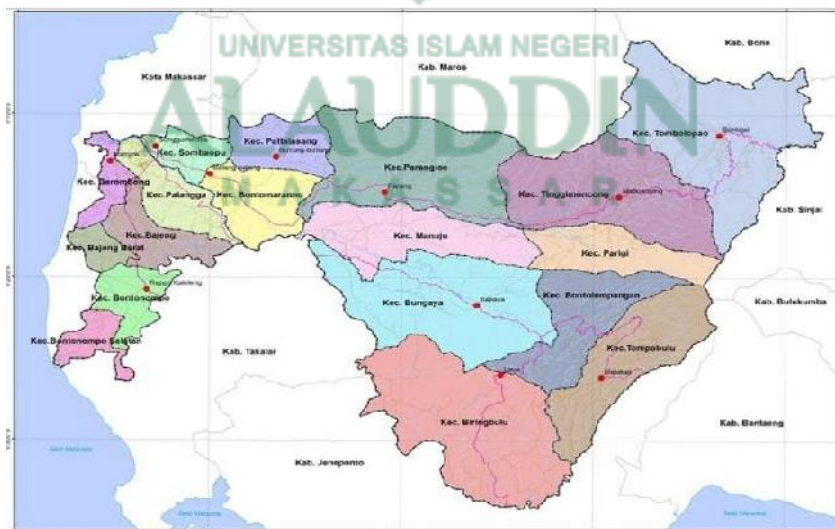
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Gowa

Kabupaten Gowa merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini merupakan salah satu dari kota penyanggah Ibu Kota Utama bersama Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar. Kabupaten Gowa memiliki wilayah seluas kurang lebih 1884 Km² yang terbagi menjadi 18 kecamatan serta 18 Kelurahan/Desa. Wilayah Kabupaten berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros di Utara, Kabupaten Sinjai, Bantaeng dan Bulukumba di Timur, Kota Makassar dan Kabupaten Takalar di Barat, serta Kabupaten Takalar dan Kabupaten Jeneponto di Timur.

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Gowa



Sumber: peta-hd.com (2021)

Kabupaten Gowa memiliki jumlah penduduk sekitar 655.942 jiwa, dengan etnis utama yakni Konjo Pegunungan yang mendiami hampir seluruh wilayah pegunungan. Kabupaten Gowa sendiri wilayahnya kurang lebih terdiri dari 72% dataran tinggi dan pegunungan yang meliputi 9 kecamatan seperti Bungaya, Bontolempangan, Parigi, Tombolo Pao, Tinggimoncong, Manuju, dan Parangloe. Sedangkan sisanya merupakan dataran rendah bertanah datar (28%) seperti kecamatan Pattallassang, Bontonompo, Pallangga, Bontonompo Selatan, Barombong, Bajeng Barat, Somba Opu, Bajeng, dan Bontomarannu.

Kabupaten Gowa memiliki Visi **“Terwujudnya Gowa sebagai Daerah Tujuan Wisata, Sejarah dan Alam yang handal dan berdaya saing tinggi di Sulawesi Selatan”**. Visi tersebut kemudian dijabarkan melalui 7 Misi berikut:

1. Melestarikan nilai, keragaman dan kekayaan budaya dalam rangka memperkuat jati diri dan karakter bangsa.
2. Mengembangkan Ekonomi kreatif dan industri pariwisata yang handal dan berdaya saing serta destinasi yang berkelanjutan.
3. Mengembangkan sumber daya kebudayaan dan pariwisata.
4. Mengembangkan jaringan hubungan kemitraan yang berbasis kerakyatan.
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bidang kebudayaan dan pariwisata yang profesional dan berkemampuan tinggi.
6. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan program antar stakechorder maupun sektor terkait.

7. Mengembangkan program pemasaran dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah.

B. Hasil Analisa Data

1. Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Berikut disajikan hasil analisis deskriptif terhadap hasil pengolahan data penelitian dalam tabel 4.1;

Tabel 4.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemanfaatan Teknologi Informasi	43	17,00	30,00	27,0233	2,96398
Kompetensi Aparatur Pemerintah	43	22,00	39,00	34,1163	3,31813
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	43	23,00	40,00	34,6279	3,61230
Standar Akuntansi Pemerintah	43	14,00	25,00	21,6279	2,75182
Valid N (listwise)	43				

Sumber: *Output SPSS V25 (2021)*

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dengan jumlah data 43 responden, ditemukan skor minimum tertinggi (23,00), skor maksimum tertinggi (40,00), skor rerata tertinggi (34,6279), dan skor standar deviasi tertinggi (3,61230) ada pada variabel Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagai variabel dependen. Hal ini dikarenakan jumlah instrumen yang dikembangkan dari variabel dependen tersebut memiliki hasil kalkulasi tertinggi dibanding variabel lainnya.

2. Analisis Deskriptif Instrumen Penelitian

a) Instrumen Penelitian Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)

Berikut disajikan hasil analisis deskriptif instrumen terhadap hasil pengolahan data variabel X1 dalam tabel 4.2;

Tabel 4.2 Deskriptif Instrumen X1

Skala	STS	TS	RR	S	SS	Total	Mean
Bobot	1	2	3	4	5		
X1.1		4	3	84	95	186	4.32558
X1.2			9	56	105	170	3.95349
X1.3		2	6	84	95	187	4.34884
X1.4			3	64	130	197	4.5814
X1.5			6	44	150	200	4.65116
X1.6		2		40	160	202	4.69767
Rata-rata Keseluruhan							4.42636

Sumber: *Olahan Tabulasi Data (2021)*

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan bahwa skor rerata tertinggi ada pada instrumen ke-6 (4.69767) dan terendah pada instrumen ke-2 (3.95349). Mayoritas responden juga menjawab setuju dan sangat setuju yang dapat didefinisikan bahwa mereka berpandangan jika pemanfaatan teknologi informasi penting untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

b) Instrumen Penelitian Kompetensi Aparatur (X2)

Berikut disajikan hasil analisis deskriptif instrumen terhadap hasil pengolahan data variabel X2 dalam tabel 4.3;

Tabel 4.3 Deskriptif Instrumen X2

Skala	STS	TS	RR	S	SS	Total	Mean
Bobot	1	2	3	4	5		
X2.1			3	104	80	187	4.348837
X2.2		2	3	100	80	185	4.302326
X2.3		2	9	112	55	178	4.139535
X2.4			6	124	50	180	4.186047
X2.5		4	6	104	65	179	4.162791
X2.6		2	6	116	55	179	4.162791
X2.7			3	100	85	188	4.372093
X2.8		2	6	68	115	191	4.44186
Rata-rata Keseluruhan							4.26453

Sumber: *Olahan Tabulasi Data (2021)*

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan bahwa skor rerata tertinggi ada pada instrumen ke-8 (4.44186) dan terendah pada instrumen ke-3 (4.139535). Mayoritas responden juga menjawab setuju dan sangat setuju yang dapat didefenisikan bahwa mereka berpandangan jika kompetensi aparatur penting untuk Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

c) Instrumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Berikut disajikan hasil analisis deskriptif instrumen terhadap hasil pengolahan data variabel Y dalam tabel 4.4;

Tabel 4.4 Deskriptif Instrumen Y

Skala	STS	TS	RR	S	SS	Total	Mean
Bobot	1	2	3	4	5		
Y1			3	140	35	178	4.13953
Y2		2	9	112	55	178	4.13953
Y3			3	104	80	187	4.34884
Y4			3	68	125	196	4.55814
Y5		2	6	68	115	191	4.44186

Y6	1		6	72	110	189	4.39535
Y7		2	9	84	90	185	4.30233
Y8			6	104	75	185	4.30233
Rata-rata Keseluruhan							4.32849

Sumber: *Olahan Tabulasi Data (2021)*

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan bahwa skor rerata tertinggi ada pada instrumen ke-5 (4.44186) dan terendah pada instrumen ke-1 dan ke-2 (4.13953). Mayoritas responden juga menjawab setuju dan sangat setuju yang dapat didefenisikan bahwa mereka berpandangan jika Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah harus diwujudkan demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

d) Instrumen Standar Akuntansi Pemerintah (M)

Berikut disajikan hasil analisis deskriptif instrumen terhadap hasil pengolahan data variabel Y dalam tabel 4.5;

Tabel 4.5 Deskriptif Instrumen M

Skala	STS	TS	RR	S	SS	Total	Mean
Bobot	1	2	3	4	5		
M1		2	6	88	90	186	4.32558
M2	1	2	9	88	80	180	4.18605
M3		4	3	84	95	186	4.32558
M4		2	3	76	110	191	4.44186
M5		2	6	84	95	187	4.34884
Rata-rata Keseluruhan							4.32558

Sumber: *Olahan Tabulasi Data (2021)*

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan bahwa skor rerata tertinggi ada pada instrumen ke-4 (4.44186) dan terendah pada instrumen ke-2 (4.18605). Mayoritas responden juga menjawab setuju dan sangat setuju yang

dapat didefenisikan bahwa mereka berpandangan jika Standar Akuntansi Pemerintah harus dipatuhi dan diterapkan dengan baik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

3. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

a) Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Keterangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X1.1	0.749	0.2542	Valid
	X1.2	0.739	0.2542	Valid
	X1.3	0.792	0.2542	Valid
	X1.4	0.729	0.2542	Valid
	X1.5	0.847	0.2542	Valid
	X1.6	0.862	0.2542	Valid
Kompetensi Aparatur Pemerintah	X2.1	0.668	0.2542	Valid
	X2.2	0.816	0.2542	Valid
	X2.3	0.778	0.2542	Valid
	X2.4	0.46	0.2542	Valid
	X2.5	0.628	0.2542	Valid
	X2.6	0.82	0.2542	Valid
	X2.7	0.578	0.2542	Valid
	X2.8	0.643	0.2542	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Y1	0.594	0.2542	Valid
	Y2	0.817	0.2542	Valid
	Y3	0.63	0.2542	Valid
	Y4	0.733	0.2542	Valid
	Y5	0.735	0.2542	Valid
	Y6	0.778	0.2542	Valid
	Y7	0.808	0.2542	Valid

	Y8	0.731	0.2542	Valid
Standar Akuntansi Pemerintah	M1	0.778	0.2542	Valid
	M2	0.7	0.2542	Valid
	M3	0.732	0.2542	Valid
	M4	0.794	0.2542	Valid
	M5	0.802	0.2542	Valid

Sumber: *Olahan Tabulasi Data (2021)*

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh instrumen yang digunakan dalam penelitian ini valid atau bisa digunakan sebagai instrumen penelitian karena skor R hitungnya lebih besar dari R tabel (R hitung > R Tabel).

4. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas Data

Hasil uji normalitas penelitian ini disajikan pada tabel 4.7 berikut ini;

Tabel 4.7 Statistik Uji Normalitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		43
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,22047346
	Absolute	,116
Most Extreme Differences	Positive	,076
	Negative	-,116
Kolmogorov-Smirnov Z		,760
Asymp. Sig. (2-tailed)		,610

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan bahwasanya skor asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.610 lebih besar dari probabilitas 0.05 ($0.610 > 0.05$) sehingga bisa disimpulkan data penelitian ini terdistribusi secara normal atau tidak ditemukan gejala ketidaknormalan data.

b) Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas penelitian ini disajikan pada tabel 4.8 berikut ini;

Tabel 4.8 Statistik Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Model		Collinearity Statistics
		Tolerance VIF
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	,411 2,433
	Kompetensi Aparatur Pemerintah	,476 2,100
	Standar Akuntansi Pemerintah	,735 1,361

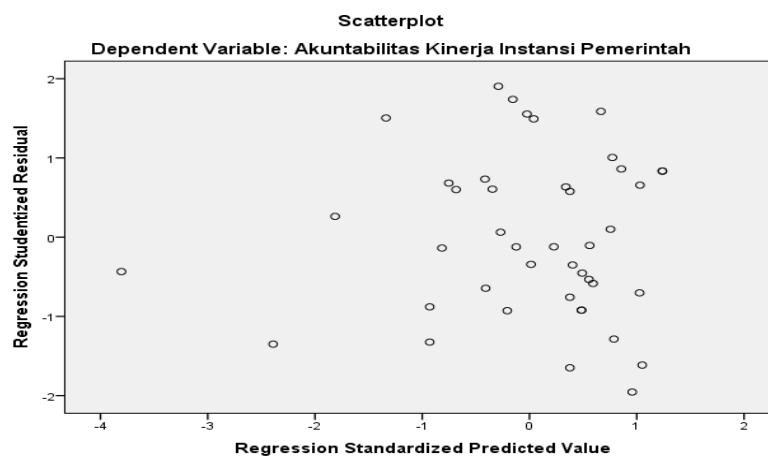
a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sajian data di atas menunjukkan skor *tolerance* tiap variabel yang besar dari 0.1 (> 0.1) dan juga skor VIF tiap variabel lebih kecil 10 (< 10). Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa data yang dianalisis tidak ditemui *sympton* multikolinearitas.

c) Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas penelitian ini disajikan pada tabel 4.9 berikut ini;

Gambar 4.2 Statistik Uji Heterokedastisitas



Sajian pada gambar di atas menunjukkan sebaran titik yang sangat acak/random tanpa membentuk pola-pola tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa data dan variabel dalam penelitian ini adalah homogen atau tidak ditemui *sympton* heterokedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi penelitian ini disajikan pada tabel 4.9 berikut ini;

Tabel 4.9 Statistik Uji Autokorelasi

Runs Test	
	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,27373
Cases < Test Value	21
Cases >= Test Value	22
Total Cases	43
Number of Runs	16
Z	-1,850
Asymp. Sig. (2-tailed)	,064

a. Median

Sajian data di atas menunjukkan skor asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.064 yang lebih besar dari probabilitas 0.05 ($0.064 > 0.05$) yang dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan *sympton* autokorelasi dalam data penelitian ini.

5. Uji Regresi Linear Berganda

a) Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk Variabel X1 dan X2

Hasil uji R^2 untuk variabel independen pertama dan kedua dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.10 Statistik Uji R² X1 dan X2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,786 ^a	,617	,598	2,29039

a. Predictors: (Constant), Kompetensi Aparatur Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan angka 0.617 pada kolom R Square (R²). Angka tersebut dapat dimaknai bahwasanya variabel pemanfaatan teknologi informasi dan kompetensi aparatur memengaruhi atau mampu mendeskripsikan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 61.7% dan sisanya sebesar 38.3% (100% - 61.7%) dideskripsikan oleh variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

b) Uji Hipotesis Parsial untuk Hipotesis 1 dan 2

Hasil uji hipotesis parsial penelitian ini disajikan pada tabel 4.11 berikut ini:

Tabel 4.11 Statistik Uji Parsial H1 dan H2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	5,365	3,750		1,431	,160
1 Pemanfaatan Teknologi Informasi (X1)	,605	,173	,496	3,502	,001
Kompetensi Aparatur Pemerintah (X2)	,378	,154	,348	2,453	,019

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Merujuk pada sajian data pada tabel di atas, dapat diturunkan formulasi sebagai berikut:

$$AKIP = 5.365 + 0.650X_1 + 0.378X_2 + e$$

Dari formulasi dan sajian tabel di atas, dapat dibuat representasi sebagai berikut:

1. Nilai Konstanta (5.365) menjelaskan bahwa jika AKIP sebagai variabel dependen bernilai 0 maka koefisiennya adalah 5.365.
2. Koefisien B *Understandardized* 0.650 dan probabilitas signifikansi 0.001 yang lebih kecil dari probabilitas signifikansi 0.05 mengungkapkan bahwa pemanfaatan TI berpengaruh positif terhadap AKIP. Artinya, semakin baik pemanfaatan TI maka akuntabilitas pemerintah juga akan semakin baik. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan diterima.
3. Koefisien B *Understandardized* 0.378 dan probabilitas signifikansi 0.019 yang lebih kecil dari probabilitas signifikansi 0.05 mengungkapkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap AKIP. Artinya, semakin kompeten aparatur yang dimiliki dalam suatu instansi pemerintahan, maka akuntabilitas juga akan semakin baik, Hal ini membuktikan bahwa hipotesis yang diajukan diterima.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2) untuk Variabel X1-M dan X2-M

Hasil uji R^2 untuk variabel independen pertama dan kedua yang sudah diintegrasikan dengan variabel moderasi dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.12 Statistik Uji R² X1-M dan X2-M

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,886 ^a	,784	,755	1,78752

a. Predictors: (Constant), X2_M, Zscore: Kompetensi Aparatur Pemerintah, Zscore: Standar Akuntansi Pemerintah, X1_M, Zscore: Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sajian data pada tabel di atas menunjukkan angka 0.784. pada kolom R Square (R²). Angka tersebut dapat dimaknai bahwasanya variabel pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi aparatur, dan Standar Akuntansi Pemerintah memengaruhi atau mampu mendeskripsikan variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebesar 78.4% dan sisanya sebesar 21.6% (100% - 78.4%) dideskripsikan oleh variabel lain yang tidak diujikan dalam penelitian ini.

d) Uji Hipotesis Parsial untuk Hipotesis 3 dan 4

Hasil uji hipotesis parsial menggunakan uji regresi linear berganda disajikan pada tabel 4.13 berikut ini.

Tabel 4.13 Statistik Uji Parsial untuk H3 dan H4

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	32,166	,541		59,468	,000
Zscore: Pemanfaatan Teknologi Informasi	1,942	,480	,538	4,046	,000
Zscore: Kompetensi Aparatur Pemerintah	1,012	,417	,280	2,428	,020
Zscore: Standar Akuntansi Pemerintah	,480	,327	,133	1,468	,151
X1_M	1,584	,659	,248	2,404	,021
X2_M	1,305	,586	,219	2,227	,032

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Merujuk pada sajian data pada tabel 4.13, dapat diturunkan formulasi sebagai berikut:

$$AKIP = 32.166 + 1.942X1 + 1.012X2 + 0.480M + 1.584X1M + 1.305X2M$$

Dari sajian formulasi dan tabel 4.13 dapat dibuat representasi sebagai berikut:

1. Koefisien *B Understandardized* X1 (Pemanfaatan TI) tanpa interaksi moderasi adalah sebesar 1.042 naik menjadi 1.584 setelah terjadi interaksi moderasi (X1-M). Signifikansi awal tanpa interaksi sebesar 0.000 naik menjadi 0.021. Hal ini membuktikan bahwa variabel moderasi (Standar Akuntansi Pemerintah) mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan TI terhadap AKIP. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang diajukan diterima.
2. Koefisien *B Understandardized* X2 (Pemanfaatan TI) tanpa interaksi moderasi adalah sebesar 1.012 naik menjadi 1.305 setelah terjadi interaksi moderasi. Signifikansi awal tanpa interaksi sebesar 0.020 naik menjadi 0.032. Hal ini membuktikan bahwa variabel moderasi (Standar Akuntansi Pemerintah) mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparatur terhadap AKIP. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang diajukan diterima.

C. Pembahasan

Hasil analisis data yang telah disajikan selanjutnya akan dikaji dalam pembahasan dan dikaitkan dengan penelitian terdahulu dan *grand theory* sebagai berikut:

1. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil analisa data dimana menunjukkan koefisien B *Understandardized* positif dan nilai signifikansi dibawah 0.05 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Positif dan signifikan di sini dapat diartikan bahwa dengan adanya teknologi informasi mampu meningkatkan akuntabilitas secara maksimal. Hasil analisa data tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemerintah. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teori TAM terkait dengan *intention to use* (kegunaan) yang menjadi sebuah kewajiban dari adanya penggunaan aplikasi. Keharusan ini seakan menjadi hal mutlak mengingat suatu sistem yang dikembangkan atau diterapkan harus memiliki kegunaan yang jelas dan terarah (Putri, 2015).

Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan. Laporan keuangan sektor publik memegang peranan penting dalam usaha menciptakan akuntabilitas sektor publik. Tuntutan semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik memperbesar kebutuhan akan transparansi informasi keuangan sektor publik. Hasil penelitian Riyadi dan Kurnadi (2020) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pemerintah. Hasil yang sama sebelumnya dikemukakan oleh Karyadi (2019) Pemanfaatan Teknologi Informasi Tidak Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam penelitian Resfiana (2019) mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara signifikan jika dimanfaatkan secara maksimal.

Pemanfaatan teknologi informasi ini menjadi sangat penting guna memberikan kebermanfaatan bagi seluruh pengguna informasi termasuk masyarakat. Terkait kebermanfaatan ini sendiri, Allah SWT telah berfirman dalam Q.S Al-Isra/17:7 sebagai berikut:

نُ أَحْسَنُكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنفُسِكُمْ

Terjemahan:

Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. (Terjemahan Kementerian Agama RI, 2021)

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dikutip dari tafsirq.com (2021), ayat tersebut ditafsirkan “Kami katakan kepada mereka, "Bila kalian berbuat baik dan taat kepada Allah, maka kebaikan itu adalah untuk diri kalian di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian berbuat maksiat, maka sebenarnya kalian telah merusak diri kalian sendiri. Ketika datang waktu pembalasan dari perbuatan jahat kalian yang terakhir--dari dua kali kejahatan yang telah kalian lakukan dalam membuat kerusakan di muka bumi--maka Kami datangkan musuh-musuh kalian untuk menorehkan bekas kejahatan, kehinaan dan kepedihan yang menyuramkan wajah-wajah kalian. Dan pada akhirnya mereka masuk Masjid Bayt al-Maqdis lalu merusaknya seperti pada kali pertama. Mereka juga akan memusnahkan apa yang mereka kuasai dengan sehabis-habisnya.”

Jika dikaitkan dengan pemanfaatan teknologi informasi, ayat ini secara implisit memerintahkan kepada seluruh pejabat yang berkaitan dengan pengelolaan informasi keuangan harus bisa memaksimalkan kehadiran teknologi untuk meningkatkan akuntabilitas keuangannya secara maksimal demi menghindari adanya penyimpangan yang dapat merugikan diri sendiri,

keluarga, masyarakat, dan *stakeholder* lainnya terkait dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

2. Pengaruh Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil analisa data menunjukkan koefisien B *Understandardized* positif dan nilai signifikansi dibawah 0.05 menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Positif dan signifikan di sini dapat diartikan bahwa dengan adanya teknologi informasi mampu meningkatkan akuntabilitas secara maksimal. Hasil analisa data tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima. Resfiana (2019) mengemukakan bahwa penerapan teknologi informasi bisa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan secara signifikan jika dimanfaatkan secara maksimal. Namun, pemanfaatan teknologi informasi ini juga harus didukung dengan kompetensi aparatur yang mumpuni. Sebagaimana yang diuraikan oleh Riawan (2016) bahwa kompetensi yang dimiliki dan dukungan sistem informasi keuangan daerah yang telah dimanfaatkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian dan pengambilan keputusan. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan.

Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut/karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Kompetensi SDM ini menjadi suatu keharusan, terlebih lagi SDM yang dalam hal ini adalah aparatur harus bisa benar-benar mengayomi dan melayani masyarakat selaku *steward* (pelayan) dalam masyarakat sebagai mana yang telah dipaparkan dalam *stewardship theory* terkait dengan peranan melayani masyarakat.

Penelitian Karyadi (2019) mengungkapkan bahwasanya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Hasil penelitian yang kurang lebih sama diungkapkan Raharja dkk. (2020) dalam penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut menjelaskan dan sepakat bahwa semakin kompeten aparatur pemerintah maka pengelolaan atau dalam hal ini akuntabilitas keuangan juga akan semakin baik.

Kompetensi aparatur erat kaitannya dengan bagaimana aparatur dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelimuannya terhadap bidang yang digeluti. Pada dasarnya, menuntut ilmu akan meningkatkan kompetensi

seseorang secara linear, di mana hal ini juga telah dijelaskan Rasulullah SAW dalam haditsnya sebagai berikut:

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya:

Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Muslim, no. 2699)

Allah SWT juga telah menegaskan dalam Q.S Al-Mujadalah/58:11

tentang pentingnya menuntut ilmu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحَ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانْشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Terjemahan:

Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “Berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Terjemahan Kementerian Agama RI, 2021)

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dikutip dari tafsirq.com (2021), ayat tersebut ditafsirkan “Wahai orang-orang yang mempercayai Allah dan rasul-Nya, apabila kalian diminta untuk melapangkan tempat duduk bagi orang lain agar ia dapat duduk bersama kalian maka lakukanlah, Allah pasti akan melapangkan segala sesuatu untuk kalian! Juga apabila kalian diminta untuk berdiri dari tempat duduk, maka berdirilah! Allah akan meninggikan derajat orang-orang Mukmin yang ikhlas dan orang-orang

yang berilmu menjadi beberapa derajat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu yang kalian perbuat.” Kutipan ayat tersebut menerangkan bahwa betapa Allah akan mengangkat derajat mereka yang menuntut ilmu beberapa kali lebih tinggi daripada yang tidak menuntut ilmu. Jika dikorelasikan dengan kompetensi yang dibahas pada bagian ini, maka sangat jelas perintah bagi aparatur untuk terus meningkatkan kompetensinya guna menghadirkan akuntabilitas yang jauh lebih baik kedepannya.

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimoderasi Standar Akuntansi Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil analisa data menunjukkan bahwa SAP mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku/sikap akuntan menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang, yang diawali dari akuntabilitas setiap instansi Pemda termasuk di dalamnya instansi pemerintah Dinas Kabupaten/Kota kepada Pemda. Selanjutnya Pemda membuat akuntabilitas untuk DPRD dan Pemerintah Pusat (Putri, 2015). Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai laporan keuangan. Hal ini kemudian harus didukung dengan kehadiran standar yang menjadi acuan prosedur kinerja yang kita kenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Penerapan standar ini tidak lain digunakan untuk menjaga prinsip *intention to use* (menjaga relevansi fungsinya) dan menghindarkan dari *behavioral intention* atau yang biasa kita istilahkan sebagai potensi penyelewengan dalam suatu pengelolaan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Lumenta dkk. (2016) yang mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian dengan hasil serupa juga diungkapkan oleh Fitriyani dan Herawati (2019) bahwa Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah. Hal tersebut menjadi hal yang wajar mengingat pada dasarnya membuat Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraeni dan Budiantara, 2015).

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual ini merupakan suatu bentuk perintah dalam bentuk pedoman dalam rangka menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam bingkai akuntabilitas. Jika dikaji secara spesifik, standar ini merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh aparatur. Keberadaan standar ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan peranan dan fungsinya khususnya dalam hal akuntabilitas. Artinya, jika standar ini dijalankan dengan baik dan benar, maka akan mendatangkan keberkahan, begitupun sebaliknya bila disalahgunakan akan mendatangkan mudharat. Allah SWT berfirman dalam Q.S Hud/11:117-119 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ . وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً ۚ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ۚ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Terjemahan:

Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusanNya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. (Terjemahan Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dikutip dari tafsirq.com (2021), ayat tersebut ditafsirkan Akan tetapi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah karena fitrah mereka yang suci, sepakat tentang

ketentuan Allah untuk mereka, sehingga mereka percaya kepada para rasul, kitab-kitab suci dan hari kiamat. Atas dasar kehendak-Nya yang telah ditetapkan dalam sistem alam raya ini, Allah menciptakan manusia siap untuk menerima pahala dan siksa. Dengan begitu, janji Allah pun terlaksana, yaitu neraka jahanam akan diisi dengan pengikut-pengikut iblis yang terdiri atas manusia dan jin. Ayat ini mengatur pentingnya menaati ketentuan Allah, pun demikian standar yang dibuat manusia sebagai wakil-wakil Allah dimuka bumi ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua ini harus dipatuhi karena pada dasarnya dibuat untuk menghadirkan kebaikan yakni akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

4. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah yang dimoderasi Standar Akuntansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini menunjukkan Hasil analisa data menunjukkan bahwa SAP mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kompetensi pada umumnya diartikan sebagai kecakapan, keterampilan, kemampuan. Kata dasarnya sendiri, yaitu kompeten, yang berarti cakap, mampu, atau terampil. Pada konteks manajemen Sumber Daya Manusia, istilah kompetensi mengacu kepada atribut / karakteristik seseorang yang membuatnya berhasil dalam pekerjaannya. Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber

daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Hal ini menjadi keharusan tersendiri mengingat peran aparatur sebagai *steward* (pelayan) dalam masyarakat dan dalam pengelolaan dilingkup pemerintahan.

Penelitian Karyadi (2019) mengungkapkan bahwasanya kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa. Hasil penelitian yang kurang lebih sama diungkapkan Raharja dkk. (2020) dalam penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut menjelaskan dan sepakat bahwa semakin kompeten aparatur pemerintah maka pengelolaan atau dalam hal ini akuntabilitas keuangan juga akan semakin baik. Lebih lanjut, kompetensi yang baik tentunya memerlukan suatu pedoman atau standar yang baku agar tujuan akuntabilitas dapat dicapai secara maksimal. Hal ini sejalan dengan penelitian Lumenta dkk. (2016) yang mengemukakan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah berbasis akrual secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian dengan hasil serupa juga diungkapkan oleh Fitriyani dan Herawati (2019) bahwa Akuntansi berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas kinerja pemerintah.

Hal tersebut menjadi hal yang wajar mengingat pada dasarnya membuat Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI merupakan salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan yang telah diterima secara umum (Nugraeni dan Budiantara, 2015).

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI ini merupakan suatu bentuk perintah dalam bentuk pedoman dalam rangka menghadirkan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam bingkai akuntabilitas. Jika dikaji secara spesifik, standar ini merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh aparatur. Keberadaan standar ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan tanggung jawab aparatur dalam menjalankan peranan dan fungsinya khususnya dalam hal akuntabilitas. Artinya, jika standar ini dijalankan dengan baik dan benar, maka akan mendatangkan keberkahan, begitupun sebaliknya bila disalahgunakan akan mendatangkan mudharat. Allah SWT berfirman dalam Q.S Hud/11:117-119 sebagai berikut:

وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْفُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ . وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً
وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ . إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّا جِئْتُم بِالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

Terjemahan:

Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.

Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. dan untuk Itulah Allah menciptakan mereka. kalimat Tuhanmu (keputusanNya) telah ditetapkan: Sesungguhnya aku akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia (yang durhaka) semuanya. (Terjemahan Kementerian Agama RI, 2021).

Dalam Kitab Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab dikutip dari tafsirq.com (2021), ayat tersebut ditafsirkan Akan tetapi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah karena fitrah mereka yang suci, sepakat tentang ketentuan Allah untuk mereka, sehingga mereka percaya kepada para rasul, kitab-kitab suci dan hari kiamat. Atas dasar kehendak-Nya yang telah ditetapkan dalam sistem alam raya ini, Allah menciptakan manusia siap untuk menerima pahala dan siksa. Dengan begitu, janji Allah pun terlaksana, yaitu neraka jahanam akan diisi dengan pengikut-pengikut iblis yang terdiri atas manusia dan jin. Ayat ini mengatur pentingnya menaati ketentuan Allah, pun demikian standar yang dibuat manusia sebagai wakil-wakil Allah dimuka bumi ini. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua ini harus dipatuhi karena pada dasarnya dibuat untuk menghadirkan kebaikan yakni akuntabilitas yang baik dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti kemudian menarik kesimpulan berikut:

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Standar Akuntansi Pemerintah mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Standar Akuntansi Pemerintah mampu memoderasi pengaruh positif dan signifikan kompetensi aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kendala dan Rekomendasi Penelitian

1. Kendala Penelitian

Beberapa kendala penelitian yang ditemui dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

- a) Terbatasnya jumlah SKPD yang bisa dibagikan kuisioner dikarenakan kondisi pandemi.

- b) Jumlah variabel independen yang digunakan masih terbatas sehingga belum mampu menjelaskan secara detail faktor-faktor yang memengaruhi variabel dependen

2. Rekomendasi Penelitian

Merujuk kepada kendala penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, berikut beberapa rekomendasi yang diberikan oleh peneliti:

- a) Kedepannya jumlah responden dan juga jumlah SKPD yang bisa dibagikan kuisioner harus bisa ditingkatkan agar ditemukan hasil yang jauh lebih spesifik lagi.
- b) Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah jumlah variabel agar khazanah pengetahuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Gowa dapat lebih kaya, variatif, dan lebih informatif

DAFTAR PUSTAKA

- Asfiansyah, A. 2015. Strategi Implementasi Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota "S"). *Jurnal NeO-Bis*, 9(1): 1-19.
- Atiningsih, S. dan A. C. Ningtytas. 2019. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1): 14-25.
- Davis, F. D. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*. 13(5): pp319-339
- Erawati, T. dan D. Kurniawan. 2018. Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual: Kajian Dari Aspek Keperilakuan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2): 313-332.
- Erlina. 2018. Akuntansi Sektor Publik; Akuntansi untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). *USU Press, Medan*.
- Faturahman. 2020. Akuntabilitas Keuangan Daerah Ditinjau dari Pengendalian Intern dan Kompetensi Aparatur serta Dampaknya terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *AKTSAR*, 3(1): 67-80.
- Fitriyani, N. dan H. Herawati. 2019. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ*, 1(2): 19-35.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi analisis multivariate dengan program IMB SPSS. Edisi 7. Semarang: penerbit universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur & Bambang Supomo. 2013. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi Dan Manajemen. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM.
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo. 2008. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Daerah: Studi Pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Organ Ilir. Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak.

- Jamaluddin, Y. 2017. Analisis Terhadap Indikator Pengukuran Akuntabilitas Kinerja Kementerian Badan Usaha Milik Negara – 2015. *Jurnal TAPIs*, 14(1): 74-86.
- Karyadi, Muh. 2019. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi di Kecamatan Aikmel dan Kecamatan Lenek Tahun 2018). *Jurnal Ilmiah Rinjani-Universitas Gunung Rinjani*, 7(2): 34-46.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 4. Jakarta: Erlangga.
- Lumenta, A. L., J. Morassa, dan L. Mawikere. 2016. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). *Jurnal EMBA*, 4(3): 135-146.
- Mahmudi. 2008. Analisis Laporan Keuangan Daerah: Panduan Bagi Eksekutif, DPRD, dan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Ekonomi, Sosial, dan Politik. UPP STIM YKPN
- Nadir, R. dan Hasyim. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru). *Akuntabel*, 14(1): 57-68.
- Novianti, I., Syamsidar, dan C. F. Syawalina. 2018. Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dan Efektivitas Fungsi Pengawasan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar. *Balance*, XV(1): 18-31.
- Nugraeni dan M. Budiantara. 2015. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *JDEB*, 12(1): 18-32.
- Putri, Egrinaen. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Akip). *JOM Fekon*, 2(2).
- Raharja, A. D., A. Suherman, dan S. Alamsyah. 2020. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Di Desa Neglasari, Desa Cijangkar, Desa Bojongkalong, Desa Mekarsari, Desa Bojongsari Dan Desa Kertaangsana Kecamatan Nyalindung Kabupaten

- Sukabumi Jawa Barat). *E-Proceeding Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi, Akuntansi FEB UNP Kediri*, 66-76.
- Resfiana. 2019. Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Aparatur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari. *Journal of Education on Social Science*, 3(1): 91-100.
- Riawan, 2016. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kualitas Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Daerah yang Dimoderasi dengan SIMDA pada SKPD Kabupaten Buton Utara. *Jurnal JESP Universitas Muhammadiyah Ponogoro*, 8(1) ISSN: 2086-1575.
- Ridwan. 2013. Peranan Etika Kerja Islam terhadap Hubungan Locus of Control dengan Kinerja Karyawan. *Trikonomik*. 12(1): 72–84.
- Ridzal, N. A. 2020. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buton. *Finansial: Jurnal Akuntansi*, 6(1): 87-97.
- Riyadi, W. dan E. Kurnadi. 2020. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Sindang Kabupaten Majalengka. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 3(2): 160-168.
- Riyani, Y., B. Mustafa, dan L. Suherma. 2017. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Akuntansi Akrua pada Pemerintah Kota Pontianak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(2): 157-166.
- Sardi, S. J., H. A. Rifai, dan L. H.. Husnan. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris pada Satker Balai Besar BMKG Wilayah III Denpasar-Bali). *Jurnal InFestasi*, 12(2): 158-172.
- Sari, M., H. Basri, dan M. Indriani. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala*, 6(2): 67-73.
- Satrio, M. D., I. Yuhertiana, dan A. Hamzah. 2016. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 18(1): 59-70.

- Sayekti, Fran dan Pulasna Putarta. 2016. Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* (3)
- Siregar, S. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan Manual & SPSS. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B). Bandung: Alfabeta.
- Supriyono. 2002. *Sistem Teknologi Informasi*, Edisi kedua, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Wijaya, Stevanus Wisnu. 2006. Kajian Teoritis Technology Acceptance Model Sebagai Model Pendekatan Untuk Menentukan Strategi Mendorong Kemauan Pengguna Dalam Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Prosiding Konferensi Nasional Sistem Informasi. Yogyakarta.
- Yuniarti. 2017. Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. *Ekombis Review*.
- Zulfiandri. 2017. Faktor-Faktor yang memengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi empiris pada OPD di Pemerintah Provinsi Banten). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 2(1): 102-125.

LAMPIRAN 1. KUISIONER PENELITIAN

KUISIONER PENELITIAN

A. Data Responden

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Nama SKPD :

Pendidikan Terakhir :

Latar Belakang Pendidikan :

Jabatan :

Lama Menjabat :

B. Petunjuk Pengisian

Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai menurut Bapak/Ibu untuk masing-masing pertanyaan yang tersedia pada lembaran daftar kuesioner. Isilah semua nomor dan sebaiknya jangan ada yang terlewatkan. Bapak/Ibu cukup memberikan tanda check list (✓) pada kolom kode jawaban yang tersedia. Adapun skor untuk masing-masing jawaban adalah sebagai berikut :

Sangat Tidak Setuju (STS) = Skor 1

Tidak Setuju (TS) = Skor 2

Netral (N) = Skor 3

Setuju (S) = Skor 4

Sangat Setuju (SS) = Skor 5

DAFTAR PERNYATAAN

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Sebaiknya setiap pegawai dibekali komputer untuk melaksanakan tugasnya					
2	Proses akuntansi yang dilakukan hendaknya dilakukan secara terkomputerisasi					
3	Laporan akuntansi hendaknya dihasilkan dari sistem informasi dan komputerisasi yang terintegrasi					
4	Adanya penggunaan teknologi informasi diharapkan meningkatkan koordinasi antar-unit dalam SKPD sehingga akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan					
5	Sebaiknya terdapat jaringan internet stabil (WiFi) dalam kantor guna mempercepat proses input dan output					
6	Kehadiran jaringan internet stabil (WiFi) bisa memudahkan proses evaluasi dan koordinasi antar unit kerja dalam SKPD					

2. Kompetensi Aparatur

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Saya telah memahami tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas saya dengan baik					
2	Saya memiliki pemahaman teknis atas pekerjaan dengan baik					
3	Saya telah memahami Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dengan baik					
4	Saya menolak setiap intervensi dari atasan yang dapat menimbulkan pelanggaran terhadap aturan.					
5	Saya mampu berinteraksi dengan menggunakan keterampilan <i>inter-personal</i>					

	dengan pihak-pihak lain dalam bidang pekerjaan saya					
6	Saya memiliki keterampilan sesuai dengan tuntutan jabatan/posisi saya					
7	Saya memiliki semangat yang kuat dalam berkompetisi guna mencapai hasil yang maksimal					
8	Saya menolak setiap gratifikasi yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab saya					

3. Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

No .	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Di SKPD saya telah ada keterkaitan yang erat antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan					
2	Di SKPD saya visi dan misi program telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis					
3	SKPD saya telah menetapkan indikator kinerja untuk setiap kegiatan atau program					
4	SKPD saya telah melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan					
5	SKPD saya telah membuat laporan terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau program					
6	SKPD saya telah melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap program atau kegiatan					
7	SKPD saya setiap kegiatan atau program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan masyarakat					
8	Di SKPD saya LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan					

4. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

No.	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	RR	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Dalam pelaksanaan akuntabilitas publik, SKPD saya telah menaati perundang-undangan yang berlaku					
2	Di SKPD saya, pejabat pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan regulasi akan dikenakan sanksi					
3	Dalam pembuatan laporan keuangan, SKPD saya telah menggunakan PP No. 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah					
4	Dalam pembuatan laporan keuangan, SKPD saya juga telah mengacu pada PP No. 58 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah					
5	Pembuatan segala jenis transaksi hingga laporan keuangan di SKPD saya telah disesuaikan dengan format yang dijelaskan dalam PP No. 71 Tahun 2010 terkait dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua					

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 40 Tahun 2021

**PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, NURHIKMA Nim: 90400114001 tertanggal 11 FEBRUARI 2021 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "PENGARUH PEMANFATAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH TERHADAP AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH BERBASIS AKRUAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Dr.Saiful, SE.,M.SA.,Ak
2. Suhartono,SE., M.Si
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 15 Februari 2021



PROF. DR. H. ABUSTANI ILYAS, M.Ag
NIP. 19661130 199303 1 003

Nomor : 2353 / EB.I/PP.00.9/06/2021
Lampiran : -
Hal : Undangan Seminar Proposal
A.n. Nurhikma/90400114001

Samata, 30 Juni 2021

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di
Tempat


Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing, untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing dan penguji pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 02 Juli 2021
Waktu : 09.00 -12.00 WITA
Judul Skripsi : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupat

Tempat : Dilakukan secara daring

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,
Bekas


Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 196611301993031 003

Catatan:

- Pembimbing dan Penguji berpakaian:
- Laki-laki : Kemeja dan Berdasi / Batik
 - Wanita: Menyesuaikan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1455 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Nurhikma, NIM : 90400114001
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Nurhikma**, NIM: **90400114001** tertanggal 24 Juni 2021 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul: "**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten**".
- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi
b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahkan tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama R.I. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua** : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekertaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Pembimbing I : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA., Akt., CA
Pembimbing II : Suhartono, SE., M.Si. Akt
Penguji I : Memen Suwandi, SE., M.Si.
Penguji II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Arnidar Hamid, SE.
2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa

Maka tanggal : 29 Juni 2021



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 196611301993031 003

PEMRAKARSA (FAKHRUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIAH MUIN, S.IP.,MM)



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1618 TAHUN 2021**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN Akuntansi FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan Ujian Komprehensif **Nurhikma : NIM: 90400114001**
- Menimbang : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI. No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI. No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **Akuntansi** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|-----------------------------------|--|
| Ketua | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. |
| Sekretaris | : Dr. Hj. Rahmawati Muin, M.Ag. |
| Penguji Dirasah Islamiyah | : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag. |
| Penguji Akuntansi Keuangan | : Memen Suwandi, SE., M.Si. |
| Penguji Auditing | : Dr. Lince Bulutading, SE., M.Si., Ak. |
| Pelaksana | : Kumiati Syukur, S.Ag. |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

**Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 19 Juli 2021**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 1961130 199303 1 003**

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Arsip

PEMRAKARS (SITI RIFQAH WIRANTI)	KEPALA TATA USAHA (HJ. NURMIATI, S.E.,MM)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax.8221400

Nomor : **341** /EB.1/PP.00.9/8/2021
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Undangan Seminar Hasil**

Samata **/6** Agustus 2021

Kepada Yth
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-
Makassar

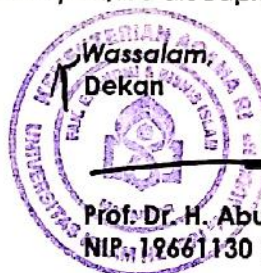
Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Nurhikma
NIM : 90400114001
Jurusan : AKUNTANSI
Judul Skripsi : Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Agustus 2021
Waktu : 09.00 - 12.00 WITA
Tempat : Dilakukan secara daring

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Catatan:

- Pembimbing dan Penguji berpakaian:
- Laki-laki : Kemeja dan Berdasi / Batik
 - Wanita : Menyesuaikan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 1936 TAHUN 2021**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.Nurhikma, NIM : 90400114001**

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **Nurhikma, NIM: 90400114001** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI, No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI, No 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI, Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

- : Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **AKUNTANSI** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustan Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
Pembimbing : Dr. Salful Muchlis, SE., M.SA., Akt., CA
Pembimbing II : Suhartono, SE., M.Si. Akt
Penguji I : Momen Suwandil, SE., M.Si.
Penguji II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Pelaksana : Farid Arfan, S.Pd. I

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Kedua

- : 1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa;
2. Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 16 Agustus 2021

Dekan



Prof. Dr. H. Abustan Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Tersebutkan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar @ Samata-Gowa
2. Para Jurusan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Asip

PEMRAKARSA (Fakhrunnisa, SE)	KEPALA TATA USAHA (Hj. Nurmiati, S.E., M.M)

Nomor : **3356** /EB.1/PP.00.9/8/2021
Sifat : Penting
Lamp :-
Hal : **Undangan Ujian Munaqasyah**

Samata, **24** Agustus 2021

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama	: Nurhikma
NIM	: 90400114001
Jurusan	: AKUNTANSI
Judul Skripsi	: "Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupat"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal	: Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu	: 09.00 - 12.00 WITA
Tempat	: Dilakukan secara daring

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Catatan:

- Pembimbing dan Penguji berpakaian:
- Laki-laki : Kemeja dan Berdasi / Batik
 - Wanita : Menyesuaikan



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2008 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQASYAH
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca : Surat permohonan : Nurhikma
NIM : 90400114001
Tanggal : 19 Agustus 2021
Mahasiswa Jurusan : AKUNTANSI
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqasyah yang berjudul "**Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI Sebagai Variabel Moderating (Studi pada SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten**"
- Menimbang : 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqasyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqasyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI. No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.**
Sekretaris : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.SI., Ak.
Penguji I : Memen Suwandi, SE., M.SI.
Penguji II : Hj. Wahidah Abdullah, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing I : Dr. Saiful Muchlis, SE., M.SA., Akt., CA
Pembimbing II : Suhartono, SE.,M.SI. Akt
Pelaksana : Farid Arfan, S.Pd. I
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaaqasyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana na mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 19 Agustus 2021
Dekan

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

PEMRAKARSA (FAKHRUNNISA)	KEPALA TATA USAHA (Hj. NURMIATI, S.E.,MM)

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurhikma, Lahir di Jeneponto pada 31 Juli 1996 sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan H. Bohari S.Pd dan Hj. Basmiati. Penulis menempuh pendidikan di SDN 109 Bonto Baddo Tolo' dan lulus pada tahun 2008 lalu kemudian melanjutkan ke jenjang sekolah menengah di SMP Negeri 1 Kelara hingga tahun 2011 dan menamatkan jenjang menengah ke atas di SMA Negeri 1 Kelara hingga lulus pada tahun 2014. Setelah menyelesaikan studi di jenjang SMA, penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 dan berhasil menyelesaikan studi sarjana (S1)-nya pada tahun 2021.